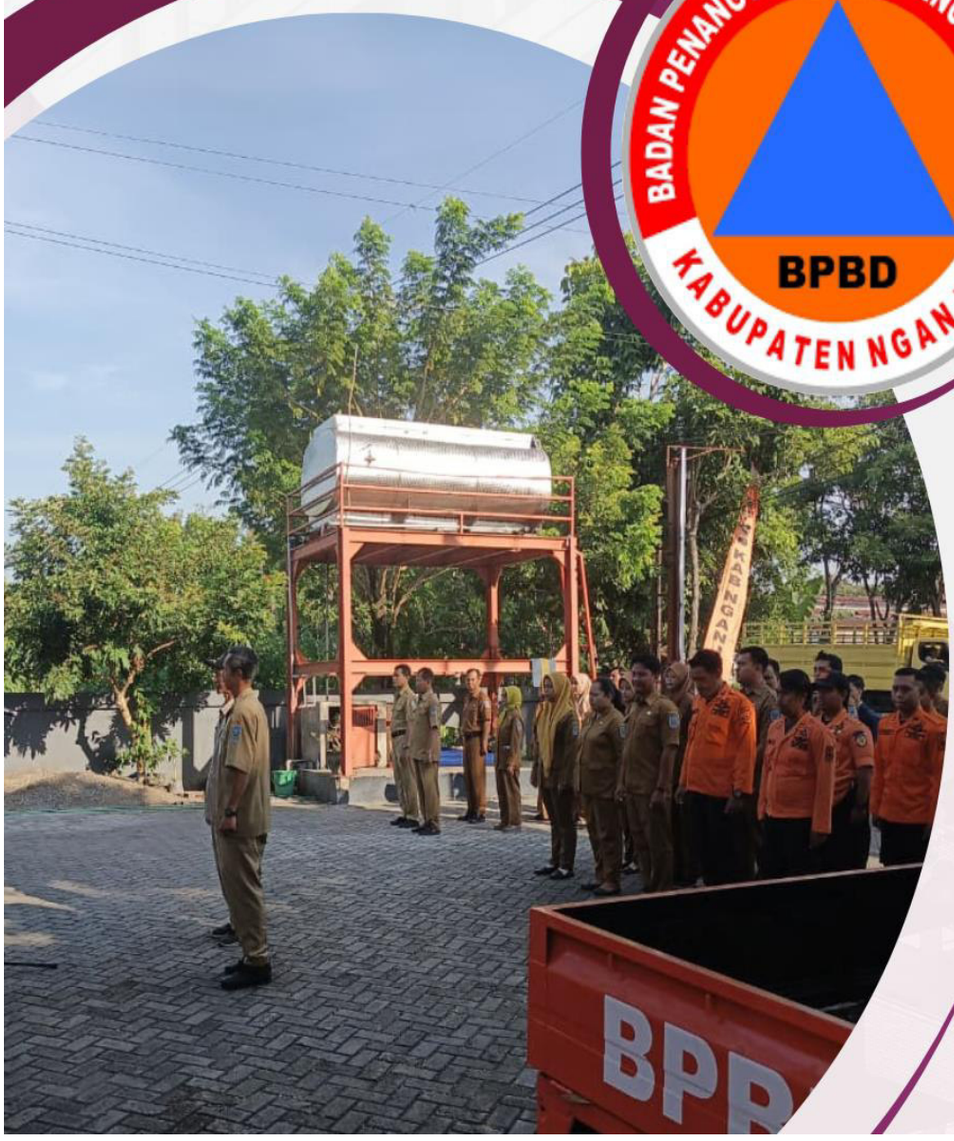
RENSTRA 2025-2029

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. NGANJUK



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

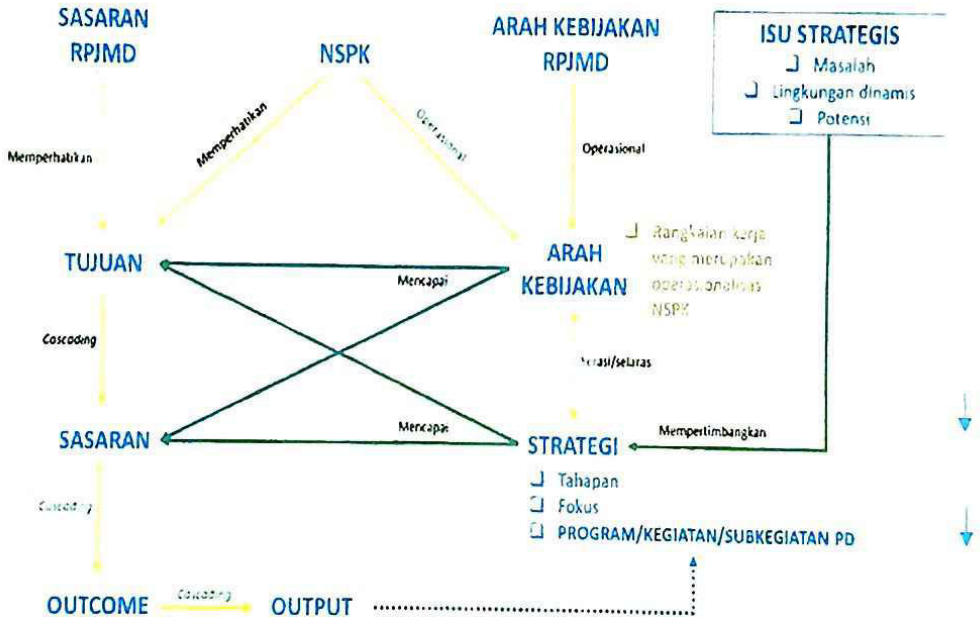
Dengan terpilihnya kepala daerah yang baru di Kabupaten Nganjuk periode Tahun 2025-2029, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlunya disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai visi, misi serta program prioritas kepala daerah terpilih.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional;

(f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Adapun konsep renstra perangkat daerah disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.1.
Konsep Renstra PD



Sumber: Kemendagri, 2025

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 2043;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Gambaran Pelayanan
- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;
- 2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
- 3.2. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
- 4.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;
- 4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penanggulangan Bencana;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanggulangan bencana; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Penanggulangan Bencana.

II. Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Program, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Ketatalaksanaan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan**.**

Sekretariat mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan penyusunan program.
b) Pelaksanaan urusan keuangan.
c) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
d) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
e) Pelaksanaan urusan perlengkapan.
f) Pelaksanaan kerumahtanggaan.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a) Melaksanakan urusan administasi surat-menyurat dan pengelolaan tata naskah dinas.
b) Melaksanakan pengelolaan administrasi barang dan inventaris kantor dan kerumahtanggaan.
c) Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
d) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan di bidang ketatausahaan, administrasi perlengkapan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.
e) Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
c) Pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Mitigasi;
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan;
f) Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan;
g) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
h) Pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi dan penyelenggaraan gladi dan simulasi penanggulangan bencana; dan

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya

IV. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas : merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Kedaruratan dan Logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratn dan Logistik
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kedaruratan dan Logistik
d. Pemberiaan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap bencana
e. Pengendalian oprasional penanganan tanggap darurat
f. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban
g. Pelaksanaan pemberian bantuan korban bencana
h. Pelaksanaan distribusi operasional peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya

V. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

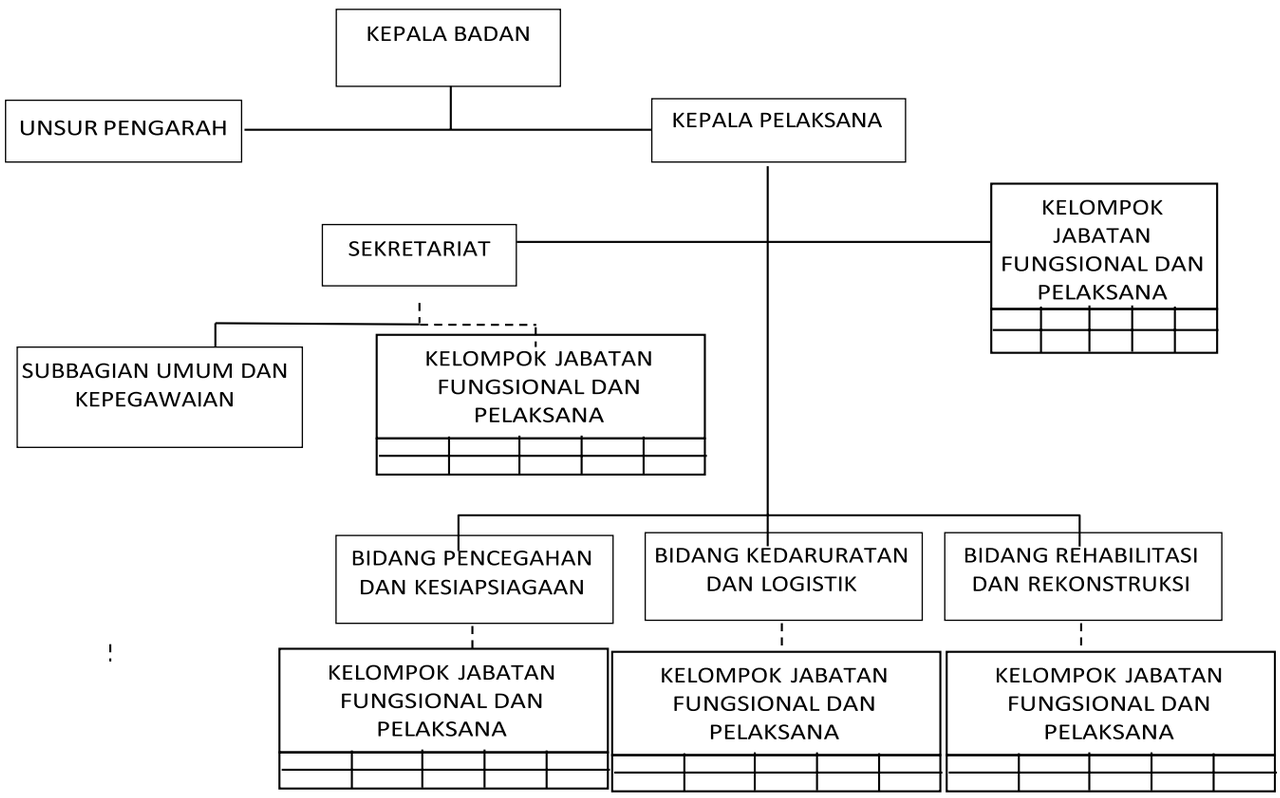
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
b. Pemberiaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
d. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
e. Pelaksanaan iventarisasi kerusakan pasca bencana, estimasi pembiayaan sarana dan prasarana

f. Pelaksanaan pemulihan dan peningkatan sarana fisik dan sosial ekonomi di wilayah pasca bencana
g. Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi, kompensasi dan pemngambilan hak pengungsi
h. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan atsan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN NGANJUK



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

1. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negeri (ASN) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 sebanyak 17 orang. Data pegawai menurut Golongan dan Jabatan adalah :

Tabel Data Administrasi Kepegawaian

Jumlah pegawai ASN dan non ASN tahun 2025

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	ASN	17	14	3
2	Non ASN	35	27	8
	Jumlah	52	41	11

Tabel Jumlah ASN menurut golongan dan jabatan tahun 2025

NO	KLASIFIKASI	ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	4	3	1
3	Golongan III	8	7	1
4	Golongan IV	4	3	1
	Jumlah	17	14	3
1	Eselon II	1	1	-
2	Eselon III	4	4	-
3	Eselon IV	1	1	-
4	Staf	7	5	2
5	Fungsional	4	3	1
	Jumlah	17	14	3

Jumlah SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk yang berstatus ASN pada tahun 2025 sebanyak 17 orang yang terdiri dari 46 % tenaga administrasi, 54 % tenaga teknis lainnya. Yang berstatus non ASN ada 35 orang dengan tugas sebagai Tim Reaksi Cepat 25 orang, sebagai tenaga administrasi 8 orang dan sebagai tenaga kebersihan 2 orang.

Sedangkan data pegawai menurut jenjang pendidikan yang pernah dilalui adalah :

Tabel Data Administrasi Menurut Tingkat Pendidikan

No	U R A I A N	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	-
2	Lulusan SLTP	Orang	-
3	Lulusan SLTA	Orang	3
4	Lulusan D2	Orang	
5	Lulusan Sarjana Muda/ D3	Orang	1
6	Lulusan S-1	Orang	11
7	Lulusan Pasca Sarjana/ S.2	Orang	2
8	Lulusan Pasca Sarjana/ S.3	Orang	-
Jumlah		**Orang**	**17**

2. Sarana Prasarana

Adapun Sarana Prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk khususnya yang menunjang kinerja perangkat daerah di bidang kebencanaan adalah :

Tabel Jumlah Sarana Prasarana Tahun 2025

No.	Fasilitas	Jenis	Klasifikasi	Jumlah/Kondisi	
				Baik	Rusak
1.	Pos Komando	a. PUSDALOPS		1 unit	-
2.	Sarana Pergudangan	a. Gudang logistik b. Gudang peralatan	Kebutuhan dasar Prasarana dasar	1 unit 1 unit	- -
3.	Sarana dan Prasarana Transportasi	a. Mobil Rescue, Dinas dan Operasional	a.Truk Tangki b.Comando Mobile c.Mobil operasional d. Ambulance e. Truk Serbaguna	2 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 unit	- - 1 unit - -
		b. Motor Rescue dan Operasional	a.Trail Rescue b.Motor Operasional	10 unit 13 unit	- 3 unit
		c. Perahu	a. Perahu Fiber b. Perahu Karet c. Perahu Lipat d. Motor Tempel (Mopel) e. Pelampung Rescue f. Pelampung standar g. Dayung plastik	1 unit 5 unit 2 unit 5 unit 10 unit 20 unit 14 unit	- 2 unit - - - - -
4.	Peralatan dan Perlengkapan Rescue	a.Vertikal Rescue	a. Peralatan Rescue Vertikal		
			- Carabiner oval screw (besi)	7 buah	1 buah
			- Carabiner Delta Screw (Besi)	6 buah	-
			- Delta Camp (Aloy)	4 buah	-
			- Delta Patzl (Wiliam)	10 buah	-
			- Puley Twin Patzl	2 buah	-
			- Puley Sigle Petzl	2 buah	1 buah
			- Puley Tandem Dmm	1 buah	-
			- Swivel Petzl	1 buah	-
			- Treverse 5 Lubang (Rangenang)	1 buah	-
			- Figur 8 Petzl	4 buah	-
			- Figur 8 Tanduk Ct	4 buah	-
			- Croll Patzl	2 buah	-
			- Pro Trextion Patzl	2 buah	-
			- Grigri Patzl	2 buah	-
			- Infinix Id Patzl	1 buah	-
			- Asap Patzl	1 buah	-
			- Askendes Tangan Patzl (Jumar)	2 set	-
			- Auto Stop Patzl	2 buah	-
			- Full Body Harnes + Croll Patzl	1 buah	-
			- Full Body Harnes Camp	2 buah	-
			- Sit Harnes Beal	1 buah	-
			- Sit Harnes Petzl	1 buah	-

			- Karmentel Statis 10mm Beal 50m	2 roll	-
			- Karmentel Statis 10mm Beal 1roll	1 roll	-
			- Karmentel Statis 6mm (Petzl)	1 roll	-
			- Karmentel 8mm Tni	1 roll	-
			- Triport + Puley +Katrol	1 set	-
			- Tri Anggel	1 buah	-
			- Tandu Basket	1 set	-
			- Helm Merah	5 buah	-
			- Tali Lempar	2 roll	-
			b. Perlengkapan Pendukung - SCBA	2 set	-
		b.Water Rescue	a. Peralatan Penyelamatan Permukaan air b. Peralatan Selam (SCUBA)	- 2 set	5 set -
		c. Perlengkapan Rescue	a. Genset (mesin) b. Genset (diesel) c. Chainsaw besar 070 d. Chainsaw kecil e. Chainsaw sedang 25” f. Pompa air alkon g. Pompa apung h. Rotasi saw (beton) i. Mesin pompa karhutla j. Mesin pemotong ranting	3 unit 1 unit 1 unit 2 unit 4 unit 8 unit 2 unit 1 unit 3 unit 2 unit	2 unit - - - 6 unit - - - - -
5.	Peralatan dan Perlengkapan Evakuasi	a. Peralatan Evakuasi	a. Velbed	101 unit	239 unit
		c. Perlengkapan Evakuasi (Tenda)	a. Tenda regu b. Tenda pleton c. Tenda Posko Lap d. Tenda Keluarga e. Tenda Posko f. Tenda pengungsi g. Tenda Keluarga BNPB h. Tenda Keluarga Doom i. Tenda individu	2 unit 1 unit - 1 set 4 unit - - 5 set -	16 unit 8 unit 2 unit 3 set 5 unit 2 unit 17 set - 2 unit
6.	Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi	a. Peralatan Komunikasi	a. Radio RIG b. Radio RPU c. Radio SSB d. Handi Talki	2 unit - 1 unit 11 unit	3 unit 2 unit - 18 unit
		b. Perlengkapan Pendukung Komunikasi	a. Mesin fax b. Komputer PC c. Akses internet 2IP50M	1 unit 9 unit 2 unit	- 1 unit -
7.	Peralatan Lain-lain	a. Perlengkapan Penunjang lain-lain	a. Arco b. Sekrop c. Dapur Umum d. Sollar Cell e. Accu Kering f. Senter Polarion g. Senter Led Gold h. Senter Led Silver i. Lampu Sorot	- 20 buah 1 set 2 buah 2 buah - 2 unit 3 unit 4 unit 6 unit	10 unit 30 buah - - - 1 unit - - - -

			j. Pakaian Pemadam Kebakaran k. Sprayer l. Tandon air m. Lampu Tenda n. Senter Hitam	10 unit 34 buah 2 unit 1 unit	- 13 buah - -
				Total	**410 unit**	**390 unit**

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPBD sampai dengan tahun 2025 selain didukung oleh SDM dari ASN dan THL juga terdapat potensi sumber daya dari relawan antara lain :

- Relawan Desa Tangguh Bencana 30 orang x 93 destana = 2.790 orang
- Relawan pelajar (Hasil kegiatan Bimtek Pelajar 5 tahun) = 1.250 orang
- Relawan Gladi Lapang = 240 orang
- Relawan Informan bencana desa/kelurahan se kabupaten Nganjuk sejumlah = 286 orang
- Relawan Organisasi Kemasyarakatan (LPBI NU, MDMC, SAR MTA, FPBI, SENOPATI RESCUE, SINGO WANDE, PMI, BP-1318 PRAMUKA, TNI, ORARI, RAPI, SENKOM, POLRI, PECINTA ALAM, dll) sejumlah kurang lebih 3.500 orang
- Total keseluruhan kurang lebih 8.066 orang

Sehubungan dengan standar kinerja pelayanan, sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan secara spesifik diatur khusus dalam sub urusan kebencanaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah dan atau bentuk parameter lainnya yang telah ditetapkan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa Standar Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan BPBD yaitu memenuhi Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana yang meliputi:

a. pelayanan informasi rawan bencana;

b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan

c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Untuk memenuhi pelayanan dasar tersebut ditetapkan indikator pencapaian pada tiap-tiap pelayanan dasar yang dilaksanakan serta target yang harus dipenuhi tiap tahunnya, seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.3.1 Jenis SPM, Indikator dan Target Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun

Target 100% dari tiap SPM diatas adalah jumlah warga negara yang ditargetkan mendapat pelayanan hanya dalam tahun berkenaan dengan mengacu perencanaan kegiatan setiap tahun dalam Renja dan disesuaikan kemampuan fiskal daerah yang ditetapkan anggarannya lewat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sampai dengan saat ini BPBD Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam serangkaian pemenuhan dan penerapan SPM. Kinerja pelayanan yang dilaksanakan BPBD mulai akhir periode renstra sebelumnya meliputi kegiatan sebagai berikut ;

a) Telah menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana sebagai acuan penetapan kebijakan kebencanaan.
b) Rutin melakukan sosialisasi dan penyebaran tentang informasi rawan bencana dan peringatan dini potensi kejadian bencana lewat website BPBD dan media sosial.
c) Aktivasi peran Pusdalops dengan Instansi Terkait.

d) Telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai acuan penetapan kebijakan kebencanaan.
e) Telah menyusun Rencana Kontijensi Bencana sebagai acuan penetapan kebijakan kebencanaan.
f) Pelayanan pencegahan/mitigasi bencana dengan membentuk desa tangguh bencana (Destana)
g) Pelatihan fasilitator relawan destana untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi bencana
h) Aktivasi Posko Siaga dan Tanggap Darurat dan bila diperlukan Pendirian Posko Lapangan di wilayah kejadian bencana.
i) Merespon cepat dengan melaksanakan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi terhadap korban bencana.
j) Melaksanakan distribusi sembako dan makan minum siap saji bersama lembaga/ instansi sosial.
k) Perbaikan darurat fasilitas umum bersama DPUPR.
l) Survey kebutuhan belanja kerusakan rumah roboh dan pemberian bantuan stimulan bersama DPRKPP.
m) Kerja bakti normalisasi dam bersama instansi terkait.
n) Normalisasi sungai-sungai / waduk dan rehabilitasi tanggul sungai, bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, DPUPR, BBWS Brantas Surabaya
o) Pembuatan Water Torn, Sumur Resapan dan Pengeboran.
p) Pemasangan Tandon Air Bersih dan dropping air bersih bersama PDAM

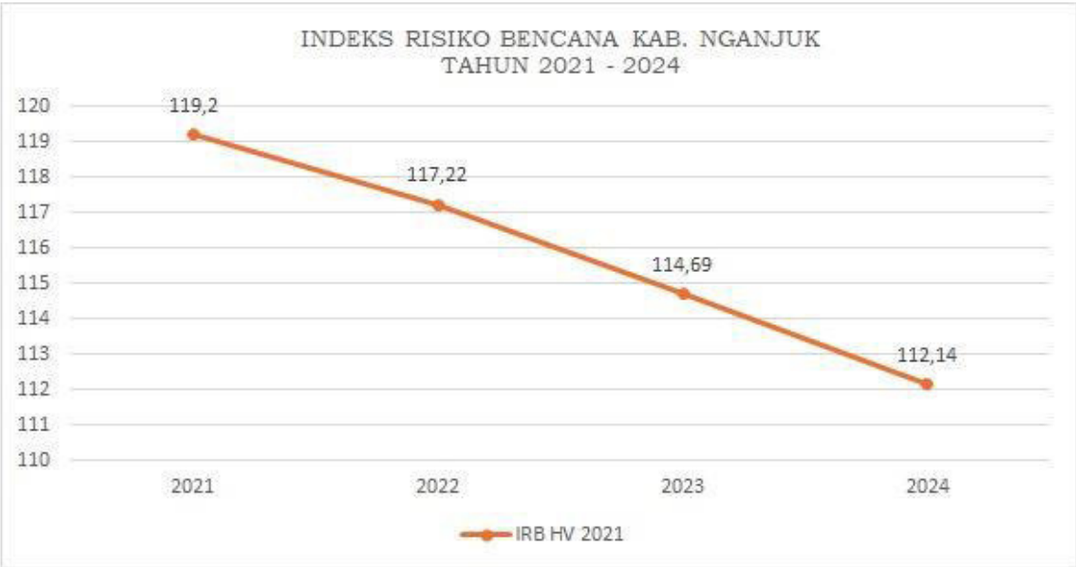
Dengan kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan tersebut diatas, sangat mempengaruhi nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Nganjuk. Semakin kecil/rendah nilai IRB berarti penanganan bencana semakin baik. IRB (Indeks Risiko Bencana) adalah suatu metode pengkajian dan penilaian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya (hazard), tingkat kerentanan (vulnerability) dan tingkat kapasitas.

Berikut ini tabel IRB Kabupaten Nganjuk berdasarkan HV 2021:

IRB	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Nganjuk	119,20	117.22	114,69	112,14

Sumber : BNPB, 2025

Bila ditampilkan dalam grafik akan terlihat seperti dibawah ini :



Sumber: BNPB, 2025

Dari diagram diatas tampak bahwa IRB Kabupaten Nganjuk mempunyai tren menurun, ini artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sudah berbenah, lebih tanggap dan tangguh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan. Perhatian dari Pemerintah Daerah telah dilakukan terhadap beberapa hal yaitu tingkat ancaman bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas kemampuan untuk mencegah dan mengatasi bencana.

Tabel 2.1.3.2 Pencapaian Kinerja (IKU) Pelayanan BPBD Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase desa tangguh bencana	64	76	100	100	81	52	64	71	72	84	0,8	0,84	0,80	0,72	1,03
2	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat	82	85	100	100	-	100	100	100	100		1,22	1,17	1,13	1	
3	Persentase pemulihan daerah terdampak bencana	84	86	95	100	-	100	50	100	100		1,19	0,58	1,13	1	
4	Rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani	-	-	-	-	90	-	-	-	-	52	-	-	-	-	0,57

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA	-	-	-	-	78	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1,28

Tabel 2.1.3.3 Pencapaian Kinerja (IKK) Pelayanan BPBD Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase desa tangguh bencana	64	76	100	100	81	52	64	71	72	84	0,8	0,84	0,80	0,72	1,03
2	Persentase pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	80	85	85	90	80					100					125
3	Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini/Early Warning System (EWS)	77	80	85	88	75					30					40
4	Persentase korban selamat akibat bencana	75	80	85	90	70					84					120
5	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana	85	90	95	95	80					46,64					58,30

No.	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Persentase perbaikan infrastruktur terdampak bencana	84	90	95	100											
7	Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA	-	-	-	-	78	-	-	-	-	78	-	-	-	-	100

Tabel 2.1.3.4 Pencapaian Kinerja (SPM) Pelayanan BPBD Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator SPM Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.1.3.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Nganjuk
Untuk Tahun Yang Sudah Dilaksanakan

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2011	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	4.096.046.160	4.505.060.590	4,222,581,274	4,900,712,282	3.011.90.659	3.738.975.120	3,605,46,151	4,429,807,679	0,73	0,83	0,85	0,90	2.150.276.688	1.687.516.445
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.178.989.740	1.910.644.490	1,986,902,500	2.819.203.550	1.908.25.650	1.757.985.301	1,858,46,382	2.708.931.591	0,87	0,92	0,93	0,98	1.727.209.445	1.593.735.636

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.6 Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: kemendagri, 2017

Dari tabel diatas, rasio antara realisasi dan anggaran untuk semua program menunjukkan besaran nilai mulai 75% keatas sehingga bisa dikatakan "Baik". Ini artinya kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk sudah menunjukkan hasil interprestasi yang bagus.

Semua program merupakan bentuk kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap masyarakat atau publik sebagai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Karena itu harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah khususnya pendanaan atau anggaran yang disediakan guna menjamin terlaksananya tujuan OPD dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan yang ada di BPBD Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat umum terutama yang tinggal di daerah rawan bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan.
b. Relawan dan komunitas siaga bencana sebagai mitra BPBD dalam penanganan darurat dan rehabilitasi pasca-bencana.
c. Instansi pemerintah sebagai koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
d. Kelompok rentan termasuk lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

BPBD tidak bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan kebencanaan. Mereka menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat kapasitas, koordinasi, dan efektivitas penanggulangan bencana. Mitra-mitra tersebut meliputi:

a. Instansi Pemerintah

- TNI dan Polri: Mendukung evakuasi, pengamanan, dan distribusi bantuan.
- Dinas teknis terkait: Seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan Dinas Lingkungan Hidup.
- BMKG: Sebagai sumber data dan informasi peringatan dini.

b. Pemerintah Desa/Kelurahan

- Mitra utama dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana.
- Membantu identifikasi risiko lokal dan penyusunan rencana kontinjensi.

c. Lembaga Pendidikan

- Sekolah dan universitas sebagai mitra edukasi kebencanaan.
- Pelaksanaan program Sekolah Aman Bencana dan pelatihan bagi pelajar/mahasiswa.

d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Sosial

- Mendukung advokasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. contoh: PMI, Karang Taruna, Pramuka, dan organisasi kemanusiaan lainnya.

e. Dunia Usaha dan Industri

- Mendukung logistik, CSR kebencanaan, dan pemulihan ekonomi pasca-bencana.
- Penyediaan alat berat, transportasi, dan bantuan darurat.

f. Akademisi dan Peneliti

- Memberikan kajian risiko, rekomendasi kebijakan, dan inovasi teknologi kebencanaan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Paradigma berfikir bahwa bencana masih merupakan tugas dari OPD membawa langkah penanganan penanggulangan bencana pada arah sulit dalam operasionalisasi. Mengingat urusan bencana adalah urusan semua pihak, yang dikendalikan langsung Pimpinan Daerah. Sedangkan BPBD adalah Instansi yang berfungsi merumuskan segala kebijakan terkait kebencanaan secara koordinatif. Sehingga segala sesuatu yang terkait langsung dan tidak langsung berkenaan dengan dukungan penanganan menjadi tugas Instansi masing-masing dengan menggunakan standarisasi penanganan kebencanaan.

Pembangunan infrastruktur, sumberdaya alam serta konservasi sumberdaya air dan kualitas lingkungan hidup dalam berbagai aspek bila dikerjakan tidak maksimal bisa menjadi pemicu awal potensi terjadinya bencana alam di Kabupaten Nganjuk. Diperberat juga keadaannya dengan kondisi jalan pada akses ekonomi potensial banyak yang rusak sehingga dapat mengganggu sistem evakuasi tanggap darurat. Sumur air bor, ekploitasi air tanah yang tidak terkendali untuk

keperluan irigasi menjadi kendala yang cukup memprihatinkan dalam penyediaan air bersih dan penyediaan air untuk penanganan bencana kebakaran, ditambah lagi infrastruktur perumahan pemukiman yang tidak terstruktur sesuai rencana tata ruang kawasan sangat mengganggu system mobilisasi tanggap bencana alam. Infrastruktur pendukung usaha yang belum memadai, kualitas SDM yang relative rendah, kesempatan kerja terbatas, jumlah masyarakat miskin dan pengangguran masih cukup tinggi, dapat memicu adanya BENCANA EKONOMI maupun BENCANA SOSIAL disamping BENCANA ALAM sebagai sasaran penanggulangan bencana.

Sesuai tugas dan fungsi BPBD, dapat diidentifikasi permasalahan yang sedang dan akan dihadapi seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan

No	Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Yang Dihadapi
				Internal	Eksternal	
1.	Yuridis	Baru tersedia Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, Perda No. 4 tahun 2024	Dibutuhkannya sosialisasi perda no. 4 tahun 2024 bagi aparatur dalam penanganan penanggulangan bencana dalam berbagai jenis situasi yang terjadi di lapangan secara lintas sektor	Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif	Regulasi pengelolaan bencana belum terpenuhi sesuai kebutuhan
2.	Unsur Pengarah	Perlunya arahan dan panduan	UU No. 24 Tahun 2007, PP	Dibutuhkannya arahan dari pihak – pihak yang	Dinamisnya kondisi lingkungan dan	Belum ada unsur pengarah penanggulang

No	Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Yang Dihadapi
				Internal	Eksternal	
		dalam pengelolaan bencana dari unsur – unsur yang kompeten	No. 21 Tahun 2008, Perda No. 4 tahun 2024	berkompeten untuk pengelolaan bencana	kompleksnya permasalahan penanggulangan bencana membutuhkan sumbangan pemikiran dan kajian dari pihak – pihak yang kompeten	an bencana sesuai peraturan perundang - undangan
3.	Sumber Daya Manusia	Kurangnya kapasitas dan kuantitas aparatur pada BPBD	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM	Penanganan bencana yang sustainable memerlukan SDM yang kompeten & dalam jumlah yang memadai	Kompetensi dan jumlah aparatur pengelolaan bencana belum memadai
4	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Sarana dan prasarana yang ada terbatas jumlah dan membutuhkan pembaruan	Peraturan Kepala Badan Nasional penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penangg	Banyak peralatan yang rusak dan sudah tidak bisa dipakai	Program prioritas dari pemerintah sangat menentukan pengadaan sarana dan prasarana.	Sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi kebutuhan standar pengelolaan bencana

No	Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Yang Dihadapi
				Internal	Eksternal	
			ulangan Bencana			
5.	Satuan Pendidikan Aman Bencana	Belum adanya kurikulum untuk pelajar setingkat SMP, SMA untuk pembelajaran tentang kebencanaan	Permendikbud No. 33 Tahun 2019	Kurangnya langkah – langkah pemerintah dalam penanggulangan bencana yang terpadu	Banyak pelajar yang belum mengerti akan pentingnya pembelajaran tentang kebencanaan	Pemahaman masyarakat, terutama dunia pendidikan terhadap pengelolaan bencana masih kurang
6.	Penanganan tanggap darurat bencana	Penanganan tanggap darurat belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Personil BPBD secara ideal kurang mencukupi jika dalam waktu yang bersamaan terjadi beberapa titik lokasi bencana	Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat	Belum optimalnya tim reaksi cepat penanggulangan bencana di skala / tingkat kabupaten

Permasalahan pada tabel diatas telah mengakomodir aspirasi/harapan pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah.

A. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat serta permasalahan yang dihadapi BPBD dalam meningkatkan pelayanan :

1. Kondisi Geografis Kabupaten Nganjuk;

2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas personil lembaga;

B. Faktor Pendorong

Faktor pendorong BPBD dalam meningkatkan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah :

1. Adanya Perda No 3 tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Nganjuk, Perda No 4 tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Bupati No 8 tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Nganjuk.
2. Kepuasan mayarakat dalam penanggulangan bencana yang diukur dengan IKM dari BPBD tiap tahun semakin naik.
3. Terbentuknya desa tangguh bencana di 84 desa rawan bencana.
4. Ketersediaan sarana dan Prasarana penanggulangan bencana di kabupaten Nganjuk.
5. BPBD berkewajiban melakukan penerapan SPM sub urusan bencana yang dijamin pelaksanaannya dan sanksinya sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 pasal 20 yaitu Kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif.

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk, penanganan bidang kebencanaan memuat strategi pengembangan sektor-sektor terkait yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian kawasan fungsi lindung serta kawasan penyangga sumber daya air meliputi :

1. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan fungsi lingkungan hidup, kawasan penyangga sumberdaya air;
2. Mengembangkan kawasan peruntukan sumberdaya air;

3. Mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung, Memulihkan fungsi kawasan lindung dan konservasi kawasan lindung yang rusak.

Rencana pola ruang wilayah untuk kawasan lindung dan kawasan strategis rawan bencana di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Gunung Wilis di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Loceret, Kecamatan Berbek serta sebagian berada di Gunung Pandan Kecamatan Rejoso dengan luas kurang lebih 7.708,60 Ha. Beserta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, yang berada di kawasan sekitar kawasan lindung tersebar di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Wilangan, dan Kecamatan Ngluyu.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah kabupaten, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan sub DAS Widas, kawasan rawan bencana alam berada di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret, Kecamatan Berbek dan sebagian di Kecamatan Rejoso.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 menunjukkan bahwa ruang lingkup wilayah BPBD meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kabupeten Nganjuk dengan titik berat lokasi pada kawasan rawan longsor dan rawan hujan angin di musim penghujan, yang berada di kawasan sekitar kawasan lindung, kawasan yang berada di sekitar aliran sungai. Di samping itu juga wilayah kecamatan yang rawan kekeringan dan kebakaran di musim kemarau yang berada di kawasan air tanah dalam, kawasan lahan kering dan kawasan padat permukiman.

2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kabupaten Nganjuk dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 3 (tiga) tahun kedepan. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten Nganjuk yaitu:

1. Pemenuhan regulasi pengelolaan bencana;
2. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana agar kebijakan terkait kebencanaan dapat responsif dan selaras dengan pengurangan risiko bencana;
3. Pemenuhan kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
4. Peningkatan pemahaman serta peran serta masyarakat terhadap pengelolaan bencana;
5. Optimalisasi tim reaksi cepat penanggulangan bencana di skala / tingkat kabupaten.

Kabupaten Nganjuk memiliki penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, yang umumnya merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial ekonomi, sehingga keterbatasan kemampuan dalam menyikapi dan mengatasi bencana alam dalam penanggulangan

bencana juga menjadi isu utama pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu-isu yang berhubungan dengan:

- Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara menghadapinya;
- Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana;

Tabel 2.2.2.1 Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Telah tersedia regulasi tentang pengelolaan bencana, diantaranya : 1. Kajian Resiko bencana 2. Rencana Penanggulangan bencana 3. rencana Kontijensi Bencana 4. JITUPASNA	Regulasi pengelolaan bencana belum terpenuhi sesuai kebutuhan	Optimalisasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dekarbonisasi	Perubahan Iklim dan Lingkungan	Permasalahan lingkungan utamanya meliputi kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air	Pemenuhan regulasi pengelolaan bencana
Memiliki personil penanggulangan bencana yaitu TRC BPBD dan Relawan bencana	Kompetensi dan jumlah aparatur pengelolaan bencana belum memadai	Mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta stabilisasi keamanan, ketentraman,	Green Development	Migrasi	Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam	Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana agar kebijakan terkait kebencanaan dapat responsif

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
		ketertiban dan kerukunan yang menjunjung tinggi budaya gotong royong masyarakat				dan selaras dengan pengurangan risiko bencana
Memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana, berupa peralatan mitigasi dan penanganan bencana serta logistic dan pemenuhan kebutuhan dasar	Sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi kebutuhan standar pengelolaan bencana	Meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologis akibat perubahan iklim terutama pada Kecamatan Ngentos, Sawahan dan Loceret	Automation, Internet of Things and Digitization	Persaingan Ekonomi		Pemenuhan kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana
Beberapa satuan pendidikan telah mendapatkan bimbingan teknis SPAB	Pemahaman masyarakat, terutama dunia pendidikan terhadap pengelolaan bencana masih kurang	Meningkatnya resiko bencana hidrometeorologi	Diversifikasi Rantai Suplai	Penggunaan Teknologi		Peningkatan pemahaman serta peran serta masyarakat terhadap pengelolaan bencana

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Telah memiliki Tim reaksi Cepat level Kabupaten	Belum optimalnya tim reaksi cepat penanggulangan bencana di skala / tingkat kabupaten	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Ekonomi Sirkular	Konflik Internasional		Optimalisasi tim reaksi cepat penanggulangan bencana di skala /tingkat kabupaten
		Masih seringnya bencana kekeringan	Physical Internet			
		Kegiatan pengurangan resiko bencana masih minim	Aglomerasi			
		Kecamatan Pace dan Loceret termasuk kedalam kawasan rawan bencana banjir kategori tinggi	Segala Sesuatu adalah Layanan			
		Kecamatan Ngentos dan	Tren Kerja Jarak Jauh			

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
		Sawahan termasuk kedalam kawasan rawan bencana longsor kategori tinggi	yang Meningkat			
		Banyaknya jumlah korban yang terkena dampak bencana	Sharing Economy			
		Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi belum mencapai target				
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana belum mencapai target				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk periode Tahun 2025-2029 yaitu **"Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat"** dan misi 3 yaitu **"Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan"**, maka ditetapkan tujuan BPBD Kabupaten Nganjuk adalah **Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana,** yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang berguna untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum dan memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap program yang telah ditetapkan.

Adapun Sasaran (*objective*) pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan (*goal)* yang telah ditetapkan dan dicapai adalah **Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan, Meningkatnya kualitas penanganan bencana, Meningkatnya pemulihan pascabencana.** Penjelasan dari sasaran tersebut adalah :

a. Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan upaya yang dilakukan yaitu :

- Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana dengan melakukan sosialisasi tentang pengurangan resiko bencana baik secara tatap muka atau melalui media cetak maupun media sosial serta penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).
- Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan melakukan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap TRC yang ada di BPBD maupun relawan, pengadaan sarpras untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, menyusun dokumen Rencana

Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (Renkon), Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) serta melakukan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

b. Meningkatnya kualitas penanganan bencana upaya yang dilakukan yaitu :

   - Meningkatkan pelayanan penyelamtan dan evakuasi dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana, menyediakan logistik untuk kebutuhan dasar saat darurat serta merespon cepat ketika terjadi bencana.

c. Meningkatnya pemulihan pascabencana, upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi dan atau menyediakan bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan menyusun dokumen untuk mengkaji kebutuhan yang harus dilakukan ketika masa pemulihan.

Tabel 3.1.1
Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran
Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah											
- Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0.63	0.6310	0.6320	0.6330	0.6340	0.6350	0.6400	
		MENINGKATNYA MITIGASI & KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	56.00	61.33	64.67	68.00	71.33	74.67	78.00	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENANGANAN BENCANA	Rata-rata waktu respon penanganan bencana (Menit)	52	50	48	45	43	40	38	
		MENINGKATNYA PEMULIHAN PASCA BENCANA	Indeks Pemulihan Pascabencana (Indeks)	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD menyesuaikan dinamika yang berkembang demi penyempurnaan yang lebih akuntabel, menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1-2850 Tahun 2025. Berikut tujuan dan sasaran yang dilakukan BPBD Kabupaten Nganjuk :

a. Tujuan BPBD yaitu Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.
b. Indikator tujuan adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Untuk target nilai IKD tiap tahun sebagai berikut :

Kondisi Awal	Target Pencapaian Tahunan					
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0,63	0,6310	0,6320	0,6330	0,6340	0,6350	0,64

c. Sasaran BPBD yaitu :
   1 Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan dengan Indikator yaitu Persentase desa tangguh bencana. Dengan adanya dokumen KRB terbaru, maka terdapat 150 desa rawan bencana di Kabupaten Nganjuk dengan kriteria tingkat kerawanan sedang sampai berat.

Kondisi Awal (%)	Target Pencapaian Tahunan(%)					
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
56	61,33	64,67	68	71,33	74,67	78

   2 Meningkatnya kualitas penanganan bencana dengan Indikator yaitu rata-rata waktu respon penanganan bencana dengan target yang ditetapkan tiap tahun mengalami perubahan.

Kondisi Awal (menit)	Target Pencapaian Tahunan (menit)					
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
52	50	48	45	43	40	38

Indikator ini menggambarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari info awal kejadian bencana, persiapan perlengkapan dan peralatan rescue, waktu keberangkatan sampai dilokasi dan mulai penanganan awal.

3 Meningkatnya pemulihan pascabencana dengan Indikator yaitu Indeks pemulihan pascabencana dengan target yang ditetapkan tiap tahun sebagai berikut :

Kondisi Awal (%)	Target Pencapaian Tahunan (%)					
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk **"Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana"**, harus dipenuhi tolok ukur atau indikator tercapainya tujuan tersebut yaitu penguatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Semakin tinggi nilai IKD berarti penanganan bencana semakin baik sehingga dikatakan tangguh dalam menghadapi bencana.

Maka dari itu strategi yang diterapkan adalah dengan memperbesar atau meningkatkan kapasitas di 3 (tiga) tahap penanganan bencana yaitu meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi Bencana, meningkatkan kapasitas tanggap darurat penanggulangan bencana dan meningkatkan kapasitas penanganan pasca bencana.

Bertolak dari strategi tersebut dan dengan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan lebih khusus diatur detailnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, maka

arah kebijakan yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan berikut ini :

Tabel 3.2.1
Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi Bencana	1. Penguatan Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah 2. Pengelolaan Sektor Strategis Daerah 3. Penguatan Kolaborasi Hexahelic 4. Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat 5. Pemantapan Transformasi Pembangunan	1. Mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintahan baik intern OPD maupun dalam sistem komando penanggulangan bencana 2. Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Kebencanaan. 3. Meningkatkan kajian atas isu-isu strategis, mengembangkan perencanaan yang partisipatif serta pengendalian dan evaluasi terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi pada masa pra bencana 4. Memberdayakan pemerintahan desa dan kecamatan untuk mandiri dalam siaga bencana 5. Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati kebencanaan secara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
				optimal sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan 6. Peningkatan basis data sistem informasi kebencanaan dan memberikan layanan informasi rawan bencana 7. Peningkatan koordinasi dgn OPD terkait dalam pelestarian lingkungan di wilayah rawan bencana 8. Peningkatan upaya bersama masyarakat dalam upaya pemahaman, pencegahan dan kapasitas lainnya dalam penanggulangan bencana
	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Peningkatan kapasitas tanggap darurat penanggulangan bencana		1. Meningkatkan pengelolaan barang inventaris dan logistik melalui pengembangan sistem informasi manajemen logistik kebencanaan 2. Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme komando dan monitoring tindak lanjut. 3. Meningkatkan profesionalisme aparat pelaksana dan Tim reaksi cepat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
				melalui kediklatan dan memberikan hak-hak sesuai ketentuan. 4. Meningkatkan pemberdayaan komunikasi informasi pusdalop dan poskolap melalui kecukupan sarana dan prasarana komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif. 5. Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi. 6. Perlindungan korban bencana dalam masa siaga darurat dan tanggap darurat
	Meningkatnya pemulihan pascabencana	Peningkatan kapasitas penanganan pascabencana		1. Meningkatkan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan prasarana lingkungan 2. Melakukan koordinasi lintas OPD untuk memfasilitasi pemulihan pasca bencana

Tabel 3.2.2
Penahapan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1. Mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintahan baik intern OPD maupun dalam sistem komando penanggulangan bencana 2. Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Kebencanaan. 3. Meningkatkan kajian atas isu-isu strategis, mengembangkan perencanaan yang	1. Mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintahan baik intern OPD maupun dalam sistem komando penanggulangan bencana 2. Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Kebencanaan. 3. Meningkatkan kajian atas isu-isu strategis, mengembangkan perencanaan yang	1. Mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintahan baik intern OPD maupun dalam sistem komando penanggulangan bencana 2. Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Kebencanaan. 3. Meningkatkan kajian atas isu-isu strategis, mengembangkan perencanaan	1. Mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintahan baik intern OPD maupun dalam sistem komando penanggulangan bencana 2. Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Kebencanaan. 3. Meningkatkan kajian atas isu-isu strategis, mengembangkan perencanaan yang	1. Mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintahan baik intern OPD maupun dalam sistem komando penanggulangan bencana 2. Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Kebencanaan. 3. Meningkatkan kajian atas isu-isu strategis, mengembangkan perencanaan yang

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
partisipatif serta pengendalian dan evaluasi terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi pada masa pra bencana 4. Memberdayakan pemerintahan desa dan kecamatan untuk mandiri dalam siaga bencana 5. Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati kebencanaan secara optimal sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan 6. Peningkatan koordinasi dengan	partisipatif serta pengendalian dan evaluasi terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi pada masa pra bencana 4. Memberdayakan pemerintahan desa dan kecamatan untuk mandiri dalam siaga bencana 5. Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati kebencanaan secara optimal sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan 6. Peningkatan koordinasi dengan	yang partisipatif serta pengendalian dan evaluasi terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi pada masa pra bencana 4. Memberdayakan pemerintahan desa dan kecamatan untuk mandiri dalam siaga bencana 5. Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati kebencanaan secara optimal sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan	partisipatif serta pengendalian dan evaluasi terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi pada masa pra bencana 4. Memberdayakan pemerintahan desa dan kecamatan untuk mandiri dalam siaga bencana 5. Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati kebencanaan secara optimal sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan 6. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait dalam	partisipatif serta pengendalian dan evaluasi terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi pada masa pra bencana 4. Memberdayakan pemerintahan desa dan kecamatan untuk mandiri dalam siaga bencana 5. Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati kebencanaan secara optimal sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan 6. Peningkatan basis data sistem informasi

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
OPD terkait dalam pelestarian lingkungan di wilayah rawan bencana 7. Peningkatan upaya bersama masyarakat dalam upaya pemahaman, pencegahan dan kapasitas lainnya dalam penanggulangan bencana 8. Meningkatkan pengelolaan barang inventaris dan logistik melalui pengembangan sistem informasi manajemen	OPD terkait dalam pelestarian lingkungan di wilayah rawan bencana 7. Peningkatan upaya bersama masyarakat dalam upaya pemahaman, pencegahan dan kapasitas lainnya dalam penanggulangan bencana 8. Meningkatkan pengelolaan barang inventaris dan logistik melalui pengembangan sistem informasi manajemen	6. Peningkatan basis data sistem informasi kebencanaan dan memberikan layanan informasi rawan bencana 7. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait dalam pelestarian lingkungan di wilayah rawan bencana 8. Peningkatan upaya bersama masyarakat dalam upaya pemahaman, pencegahan dan kapasitas lainnya dalam	pelestarian lingkungan di wilayah rawan bencana 7. Peningkatan upaya bersama masyarakat dalam upaya pemahaman, pencegahan dan kapasitas lainnya dalam penanggulangan bencana 8. Meningkatkan pengelolaan barang inventaris dan logistik melalui pengembangan sistem informasi manajemen logistik kebencanaan 9. Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui	kebencanaan dan memberikan layanan informasi rawan bencana 7. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait dalam pelestarian lingkungan di wilayah rawan bencana 8. Peningkatan upaya bersama masyarakat dalam upaya pemahaman, pencegahan dan kapasitas lainnya dalam penanggulangan bencana 9. Meningkatkan pengelolaan barang inventaris

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
logistik kebencanaan 9. Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme komando dan monitoring tindak lanjut. 10. Meningkatkan profesionalisme aparat pelaksana dan Tim reaksi cepat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak sesuai ketentuan. 11. Meningkatkan pemberdayaan komunikasi informasi	logistik kebencanaan 9. Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme komando dan monitoring tindak lanjut. 10. Meningkatkan profesionalisme aparat pelaksana dan Tim reaksi cepat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak sesuai ketentuan. 11. Meningkatkan pemberdayaan komunikasi informasi	penanggulangan bencana 9. Meningkatkan pengelolaan barang inventaris dan logistik melalui pengembangan sistem informasi manajemen logistik kebencanaan 10. Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme komando dan monitoring tindak lanjut. 11. Meningkatkan profesionalisme aparat pelaksana	peningkatan profesionalisme komando dan monitoring tindak lanjut. 10. Meningkatkan profesionalisme aparat pelaksana dan Tim reaksi cepat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak sesuai ketentuan. 11. Meningkatkan pemberdayaan komunikasi informasi pusdalop dan poskolap melalui kecukupan sarana dan prasarana komunikasi, pelatihan,	dan logistik melalui pengembangan sistem informasi manajemen logistik kebencanaan 10. Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme komando dan monitoring tindak lanjut. 11. Meningkatkan profesionalisme aparat pelaksana dan Tim reaksi cepat melalui kediklatan dan memberikan hak-

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
pusdalop dan poskolap melalui kecukupan sarana dan prasarana komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif. 12. Perlindungan korban bencana dalam masa siaga darurat dan tanggap darurat 13. Meningkatkan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan prasarana lingkungan 14. Melakukan koordinasi lintas OPD untuk	pusdalop dan poskolap melalui kecukupan sarana dan prasarana komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif. 12. Perlindungan korban bencana dalam masa siaga darurat dan tanggap darurat 13. Meningkatkan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan prasarana lingkungan 14. Melakukan koordinasi lintas OPD untuk	dan Tim reaksi cepat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak sesuai ketentuan. 12. Meningkatkan pemberdayaan komunikasi informasi pusdalop dan poskolap melalui kecukupan sarana dan prasarana komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif. 13. Perlindungan korban bencana dalam masa siaga darurat dan tanggap darurat	pembinaan dan dialog interaktif. 12. Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi. 13. Perlindungan korban bencana dalam masa siaga darurat dan tanggap darurat 14. Meningkatkan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan prasarana lingkungan 15. Melakukan koordinasi lintas OPD untuk memfasilitasi	hak sesuai ketentuan. 12. Meningkatkan pemberdayaan komunikasi informasi pusdalop dan poskolap melalui kecukupan sarana dan prasarana komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif. 13. Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi. 14. Perlindungan korban bencana dalam masa siaga darurat dan tanggap darurat

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
memfasilitasi pemulihan pasca bencana	memfasilitasi pemulihan pasca bencana	14. Meningkatkan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan prasarana lingkungan 15. Melakukan koordinasi lintas OPD untuk memfasilitasi pemulihan pasca bencana	pemulihan pasca bencana	15. Meningkatkan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan prasarana lingkungan 16. Melakukan koordinasi lintas OPD untuk memfasilitasi pemulihan pasca bencana

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk termasuk OPD yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar, yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan sub urusan tersendiri yaitu Sub Urusan Bencana sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 101 tahun 2018.

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka secara teknis BPBD hanya menjalankan 1 (satu) program saja yaitu Program Penanggulangan Bencana. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. Dari kegiatan-kegiatan tersebut tetap mengedepankan 3 (tiga) tujuan utama sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang rincian tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu :

1) Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan, Pencegahan dan mitigasi Bencana (**Tahap Pra Bencana**)
2) Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat penanggulangan bencana (**Tahap Tanggap Bencana**)
3) Peningkatan Kapasitas Penanganan Pasca Bencana (**Tahap Pasca Bencana**)

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif

Berdasarkan dari regulasi-regulasi tersebut diatas, BPBD menyusun rencana strategis 2025-2029 dan telah tersusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan seperti dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1.1

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rencana Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
- Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana				Indeks Ketahanan Daerah		
		MENINGKATNYA MITIGASI & KESIAPSIAGAAN BENCANA			Persentase Desa Tangguh Bencana		
			meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah BPBD		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					DPA-SKPD		
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Perlengkapan Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Layak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			MENINGKATNYA PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA		PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENDAPAT LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terlaksananya layanan informasi dengan tatap muka dan melalui media	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
				Tersusunnya Dokumen Informasi Rawan Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersusunnya Dokumen Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENANGANAN BENCANA			Rata-rata waktu respon penanganan bencana		
			MENINGKATNYA PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya sarana prasarana dan Logistik untuk penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		MENINGKATNYA PEMULIHAN PASCA BENCANA			Indeks Pemulihan Pascabencana		
			MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA		PERSENTASE REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI YANG DILAKUKAN	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terlaksananya penanganan pascabencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen pascabencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	

Tabel 4.1.2
PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					7.945.509.000,00		9.517.357.000,00		9.892.050.000,00		10.803.550.000,00		10.948.550.000,00	
1.05.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.602.509.000,00		5.670.857.000,00		5.726.550.000,00		5.877.050.000,00		5.948.050.000,00	
meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah BPBD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,1	83,2	83,33	4.602.509.000,00	83,53	5.670.857.000,00	83,69	5.726.550.000,00	83,81	5.877.050.000,00	83,90	5.948.050.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					3.343.000.000,00		3.846.500.000,00		4.165.500.000,00		4.926.500.000,00		5.000.500.000,00	
MENINGKATNYA PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENDAPAT LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA (%)	0.0023	0.0023	0.0025	87.500.000,00	0.0028	96.000.000,00	0.0030	105.000.000,00	0.0032	415.000.000,00	0.0034	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	0.685	0.686	0.688	2.313.500.000,00	0.693	2.588.500.000,00	0.695	2.838.500.000,00	0.696	3.118.500.000,00	0.698	3.443.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
MENINGKATNYA PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	90	90	90	559.000.000,00	90	639.000.000,00	90	699.000.000,00	90	770.000.000,00	90	784.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	PERSENTASE REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI YANG DILAKUKAN (%)	69.5	71.5	72.5	383.000.000,00	73.5	523.000.000,00	74.5	523.000.000,00	75.5	623.000.000,00	76.5	623.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					7.945.509.000,00		9.517.357.000,00		9.892.050.000,00		10.803.550.000,00		10.948.550.000,00	

Tabel 4.1.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.945.509.000,00		9.517.357.000,00		9.892.050.000,00		10.803.550.000,00		10.948.550.000,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.602.509.000,00		5.670.857.000,00		5.726.550.000,00		5.877.050.000,00		5.948.050.000,00		
meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah BPBD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,1	83,33	4.602.509.000,00	83,53	5.670.857.000,00	83,69	5.726.550.000,00	83,81	5.877.050.000,00	83,90	5.948.050.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.509.000,00		55.857.000,00		55.550.000,00		56.050.000,00		57.050.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			-	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	5.409.000,00	3	6.707.000,00	3	6.400.000,00	3	6.900.000,00	3	7.900.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Dokumen Perubahan DPA-SKPD													
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			-	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.409.000,00		6.707.000,00		6.400.000,00		6.900.000,00		7.900.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	5.409.000,00	3	6.707.000,00	3	6.400.000,00	3	6.900.000,00	3	7.900.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD													
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				-		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			-	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				-		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			-	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1	1.525.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.133.500.000,00		3.480.500.000,00		3.540.500.000,00		4.040.500.000,00		4.360.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	18	3.123.000.000,00	23	3.470.000.000,00	25	3.530.000.000,00	30	4.030.000.000,00	35	4.350.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.123.000.000,00		3.470.000.000,00		3.530.000.000,00		4.030.000.000,00		4.350.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	18	3.123.000.000,00	23	3.470.000.000,00	25	3.530.000.000,00	30	4.030.000.000,00	35	4.350.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	18	7.000.000,00	18	7.000.000,00	18	7.000.000,00	18	7.000.000,00	18	7.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	18	7.000.000,00	18	7.000.000,00	18	7.000.000,00	18	7.000.000,00	18	7.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Perlengkapan Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Layak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				455.500.000,00		457.500.000,00		307.500.000,00		457.500.000,00		457.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	250	350.000.000,00	250	350.000.000,00	180	200.000.000,00	250	350.000.000,00	250	350.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	-	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000,00		350.000.000,00		200.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	250	350.000.000,00	250	350.000.000,00	180	200.000.000,00	250	350.000.000,00	250	350.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	-	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150.000.000,00		760.000.000,00		1.100.000.000,00		600.000.000,00		350.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	0	-	20	80.000.000,00	0	-	0	-	30	100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	5	30.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	5	200.000.000,00	1	850.000.000,00	5	200.000.000,00	0	-	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	10	150.000.000,00	30	450.000.000,00	20	250.000.000,00	30	400.000.000,00	20	250.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		200.000.000,00		850.000.000,00		200.000.000,00		-	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	5	200.000.000,00	1	850.000.000,00	5	200.000.000,00	0	-	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		80.000.000,00		-		-		100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	0	-	20	80.000.000,00	0	-	0	-	30	100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000,00		450.000.000,00		250.000.000,00		400.000.000,00		250.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	10	150.000.000,00	30	450.000.000,00	20	250.000.000,00	30	400.000.000,00	20	250.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		30.000.000,00		-		-		-	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	5	30.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177.500.000,00		177.500.000,00		177.500.000,00		177.500.000,00		177.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1250	1700	2.500.000,00	1700	2.500.000,00	1700	2.500.000,00	1700	2.500.000,00	1700	2.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1250	1700	2.500.000,00	1700	2.500.000,00	1700	2.500.000,00	1700	2.500.000,00	1700	2.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				637.000.000,00		687.000.000,00		493.000.000,00		493.000.000,00		493.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	10	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Dipelihara/Direhabilitasi													
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	271	250	15.000.000,00	250	15.000.000,00	250	15.000.000,00	250	15.000.000,00	250	15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37	37	324.000.000,00	37	324.000.000,00	40	330.000.000,00	40	330.000.000,00	40	330.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	250.000.000,00	3	300.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				324.000.000,00		324.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37	37	324.000.000,00	37	324.000.000,00	40	330.000.000,00	40	330.000.000,00	40	330.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	271	250	15.000.000,00	250	15.000.000,00	250	15.000.000,00	250	15.000.000,00	250	15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	250.000.000,00	3	300.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				3.343.000.000,00		3.846.500.000,00		4.165.500.000,00		4.926.500.000,00		5.000.500.000,00		
MENINGKATNYA PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENDAPAT LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	0.0023	0.0025	87.500.000,00	0.0028	96.000.000,00	0.0030	105.000.000,00	0.0032	415.000.000,00	0.0034	150.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				87.500.000,00		96.000.000,00		105.000.000,00		415.000.000,00		150.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya layanan informasi dengan tatap muka dan melalui media	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300	150	87.500.000,00	150	96.000.000,00	150	105.000.000,00	150	115.000.000,00	150	150.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				87.500.000,00		96.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00		150.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300	150	87.500.000,00	150	96.000.000,00	150	105.000.000,00	150	115.000.000,00	150	150.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersusunnya Dokumen Informasi Rawan Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling		0	-	0	-	0	-	1	300.000.000,00	0	-	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	lama dalam 1 (satu) tahun													
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				-		-		-		300.000.000,00		-	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		0	-	0	-	0	-	1	300.000.000,00	0	-	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
MENINGKATNYA PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	90	90	559.000.000,00	90	639.000.000,00	90	699.000.000,00	90	770.000.000,00	90	784.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				559.000.000,00		639.000.000,00		699.000.000,00		770.000.000,00		784.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	24	25	155.000.000,00	25	155.000.000,00	25	155.000.000,00	25	155.000.000,00	25	155.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki	0.5	52	100.000.000,00	52	100.000.000,00	52	100.000.000,00	52	100.000.000,00	52	100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis													
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	25	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	225.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	24	25	155.000.000,00	25	155.000.000,00	25	155.000.000,00	25	155.000.000,00	25	155.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan				-		-		-		-		225.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Bencana Kabupaten/Kota														
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	225.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0.5	52	100.000.000,00	52	100.000.000,00	52	100.000.000,00	52	100.000.000,00	52	100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	25	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya sarana prasarana dan Logistik untuk penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000	500	239.000.000,00	650	319.000.000,00	700	379.000.000,00	750	450.000.000,00	500	239.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				239.000.000,00		319.000.000,00		379.000.000,00		450.000.000,00		239.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000	500	239.000.000,00	650	319.000.000,00	700	379.000.000,00	750	450.000.000,00	500	239.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	PERSENTASE REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI YANG DILAKUKAN	69.5	72.5	383.000.000,00	73.5	523.000.000,00	74.5	523.000.000,00	75.5	623.000.000,00	76.5	623.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				383.000.000,00		523.000.000,00		523.000.000,00		623.000.000,00		623.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya penanganan pascabencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4	7	383.000.000,00	9	423.000.000,00	9	423.000.000,00	9	523.000.000,00	9	523.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				383.000.000,00		423.000.000,00		423.000.000,00		523.000.000,00		523.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4	7	383.000.000,00	9	423.000.000,00	9	423.000.000,00	9	523.000.000,00	9	523.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersusunnya Dokumen pascabencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.685	0.688	2.313.500.000,00	0.693	2.588.500.000,00	0.695	2.838.500.000,00	0.696	3.118.500.000,00	0.698	3.443.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				2.050.000.000,00		2.325.000.000,00		2.575.000.000,00		2.855.000.000,00		3.180.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya sarana prasaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	108	100	60.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	140	150.000.000,00	140	150.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1	1	35.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				35.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1	1	35.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	108	100	60.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	140	150.000.000,00	140	150.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	10	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	300.000.000,00	5	200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan	10	10	80.000.000,00	10	80.000.000,00	20	230.000.000,00	20	230.000.000,00	20	230.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	menghadapi bencana													
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	38	35	1.200.000.000,00	35	1.300.000.000,00	35	1.400.000.000,00	35	1.430.000.000,00	35	1.430.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	800	600	175.000.000,00	800	275.000.000,00	800	275.000.000,00	1000	375.000.000,00	800	275.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				175.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		375.000.000,00		275.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana	800	600	175.000.000,00	800	275.000.000,00	800	275.000.000,00	1000	375.000.000,00	800	275.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
kawasan rawan bencana	(per jenis ancaman) Kabupaten/Kota													
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				80.000.000,00		80.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	10	10	80.000.000,00	10	80.000.000,00	20	230.000.000,00	20	230.000.000,00	20	230.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				1.200.000.000,00		1.300.000.000,00		1.400.000.000,00		1.430.000.000,00		1.430.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	38	35	1.200.000.000,00	35	1.300.000.000,00	35	1.400.000.000,00	35	1.430.000.000,00	35	1.430.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	10	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	300.000.000,00	5	200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersusunnya Dokumen Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	1	300.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	300.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	225.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	0	-	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				-		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling	0	0	-	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	lama dalam 1 (satu) tahun													
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				-		-		-		-		225.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	225.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				300.000.000,00		-		-		-		300.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	1	300.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	300.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				263.500.000,00		263.500.000,00		263.500.000,00		263.500.000,00		263.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2	2	188.500.000,00	2	188.500.000,00	2	188.500.000,00	2	188.500.000,00	2	188.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				188.500.000,00		188.500.000,00		188.500.000,00		188.500.000,00		188.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2	2	188.500.000,00	2	188.500.000,00	2	188.500.000,00	2	188.500.000,00	2	188.500.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan kebencanaan, BPBD mendukung program unggulan kepala daerah tahun 2025-2029. Adapun program kegiatan tersebut disajikan pada table berikut :

Tabel Teknik Penyusunan Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Unggulan Kepala Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	PROGRAM UNGGULAN 3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Program Penanggulangan Bencana	1. Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
2	PROGRAM UNGGULAN 5 Penguatan pendidikan Diniyah dan pesantren		2. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			3. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

			4. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

Program prioritas urusan kebencanaan yang mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.1
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	MENINGKATNYA PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
		MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		MENINGKATNYA PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		BENCANA		
		MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
		MENINGKATNYA PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
			1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
		MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
		MENINGKATNYA PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
		MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
		MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	

4.3. Indikator Kinerja Utama

Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Perangkat daerah diukur dengan Indikator Kinerja Utama, yang merupakan indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi. Adapun Indikator Kinerja Utama BPBD disajikan pada table berikut :

Tabel 4.3.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,63	0,631	0,632	0,633	0,634	0,635	0,64	
2.	Rata-rata waktu respon penanganan bencana	Menit	52	50	48	45	43	40	38	
3.	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	56	61,33	64,67	68	71,33	74,67	78	
4.	Indeks Pemulihan Pascabencana	Indeks	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	

4.4. Indikator Kinerja Kunci

Keberhasilan penyelenggaraan sub urusan kebencanaan diukur dengan Indikator Kinerja Kunci sub urusan kebencanaan, Indikator Kinerja Kunci tersebut disajikan pada table berikut :

Tabel 4.4.1
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	positif	%	0.0023	0.0023	0.0025	0.0028	0.0030	0.0032	0.0034	
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	positif	%	0.685	0.686	0.688	0.693	0.695	0.696	0.698	
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	%	90	90	90	90	90	90	90	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nganjuk

SUTOMO, S.Sos,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19740802 199803 1 005